

SKRIPSI
KEDUDUKAN PERADILAN ADAT SETELAH DIBERLAKUKANNYA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NO 7 TAHUN 2018
TENTANG NAGARI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program S1 Pada Fakultas
Hukum Universitas Andalas*



Oleh :

IKHSAN FADILLAH

1510112164

Dosen Pembimbing : 1. H. Ilhamdi Taufik, S.H., M.H.

2. Alsyam, S.H., M.H.

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2019

**KEDUDUKAN PERADILAN ADAT SETELAH DIBERLAKUKANNYA PERATURAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NO 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI**
Ikhsan Fadillah, 1510112164, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, PK V (Hukum
Tata Negara)

ABSTRAK

Peradilan Adat adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebabkan timbulnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, dimana terdapat pengaturan mengenai Peradilan Adat yang berbeda dari Peraturan Daerah sebelumnya, terdapat pengaturan yang lebih signifikan mengenai Peradilan Adat. Sehingga memungkinkan keberadaan Peradilan Adat terkhusus di Sumatera Barat cukup jelas. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini antara lain : Bagaimana Kedudukan peradilan adat berdasarkan Perda Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di Provinsi Sumatera Barat dan Bagaimana Implementasi dari putusan peradilan adat dalam perkara di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data pendukung yaitu data sekunder melakukan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kedudukan dari Peradilan Adat yang tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari , belum diatur secara rinci mengenai peradilan adat oleh Peraturan Daerah sebelumnya, namun setelah lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 sudah diatur secara rinci mengenai peradilan adat Serta implementasi dari putusan peradilan adat memiliki berbagai macam dilema dalam pelaksanaan putusan tersebut, ada yang mematuhi dan ada juga yang tidak mematuhi dari putusan peradilan adat tersebut.

